



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**

---

**BIRO HUMAS SEKRETARIAT  
DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	35
----------------------------	----

**LAMPIRAN:**

Tabel T.VI.C.5 .....	12
Tabel T.VI. C.7 .....	21
Tabel T. VI. C.8 .....	25
Tabel T.VI.C.9 .....	31
Tabel T.VI. C.10 .....	33

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL I	Hasil Pengukuran Kinerja Biro Humas Tahun 2019	6
TABEL II	Realisasi Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019	7
TABEL III	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat	11
TABEL IV	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Humas Provinsi Sumatera Barat	15
TABEL V	Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat	24
TABEL VI	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat	27
TABEL VII	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat	32

## KATA PENGANTAR

Sebagai lembaga dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan landasan dalam menyusun visi Biro Humas. Berdasarkan Visi Provinsi Sumatera Barat "***Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Martabat***", Maka selanjutnya Visi Biro Humas "***Terwujudnya Masyarakat Informatif dan Partisipatif Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintah yang baik, bersih dan profesional*** "

Kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Renja Biro Humas tahun 2021 ini dapat selesai pada waktunya. Biro Humas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik khususnya bidang Informasi, peningkatan komunikasi dua arah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan masyarakat dan upaya penciptaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Barat lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen RENJA ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Biro Humas.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.

Padang, Desember 2019  
Kepala Biro Humas

**Drs.JASAMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680101 198809 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Biro Humas) merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Biro Humas Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Renja Biro Humas Tahun 2021 ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Humas pada Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Biro Humas yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Tahun 2016-2021 untuk menunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

#### **I.1.a. Proses Penyusunan Renja Biro Humas.**

Dalam hal penyusunan Renja Biro Humas untuk Tahun 2021 dimulai dari Tahapan persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

##### **1.a.1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah**

Pembentukan tim penyusun Renstra dan Reja Biro Humas dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Biro Humas tentang pembentukan tim penyusun Renstra dan Reja Biro Humas Sekretariata Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Biro Humas yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renja Biro Humas dipersiapkan oleh Kepala Biro Humas dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan kepala Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nomor : 050/172/Humas-2019.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra dan Renja Biro Humas yang ditetapkan dengan keputusan kepala Biro Humas ini sebagai berikut

Ketua Tim : Kepala Biro Humas

Sekretaris Tim : Kabag Pengelolaan Administrasi Informasi

Anggota : 1. Kabag Analisa Kebijakan dan Media

2. Kabag Penyelenggaraan Informasi Pimpinan

[2]

3. Kasubag Tata Usaha
4. Kasubag Analisa
5. Kasubag Media Massa
6. Kasubag Liputan
7. Kasubag Dokumentasi dan Peliputan
8. Staf Biro Humas yang Menangani Perencanaan
9. Staf Masing-Masing Subbbag di Biro Humas

Tim penyusun Renja Biro Humas bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja Biro Humas.

Susunan kelompok kerja tim ini telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyusunan renstra dan rencana kerja tahunan Biro Humas, untuk keberhasilan tim ini dalam menyusun renstra dan rencana kerja tahunan diminta juga masukan dari tim ahli yang berkompeten di bidang kehumasan sebagai bahan referensi sehingga apa yang dihasilkan oleh tim bisa optimal.

Penyusunan agenda kerja dokumen rencana kerja sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen rencana kerja Biro Humas. Dalam pengolahan data dan informasi perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap inventaris data, pengumpulan, dan pengolahan data. Tidak semua data dan informasi yang terkumpul, disajikan dalam dokumen perencanaan, bergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan Biro Humas.

Rancangan awal Rencana Kerja dijadikan acuan bagi setiap kepala bagian di Biro Humas dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya seperti yang tertuang dalam matrik kerja dibawah ini :

## Matrik Penyusunan Renja Tahun 2021

NO	kegiatan TIM	Bulan/Minggu																Penanggung jawab
		September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Menginventarisir data dan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan ada di tahun 2020 baik Nasional maupun Lokal baik yang rutin maupun yang kebijakan pusta dan kepala daerah																	Sekretaris TIM
2.	Evaluasi dan Review data yang didapatkan																	Ketua TIM
3.	Review Renja Tahun sebelumnya																	Ketua TIM
4.	Penyusunan Rancangan Renja tahun 2021																	Ketua TIM I
5.	Finaslisasi dan Penyampaian Renja Tahun 2021 ke Bappeda																	Kasubag Tata Usaha

I.1.b. Keterkaitan antara Renja Biro Humas dengan RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota.



Untuk menjamin kesinambungan perencanaan, seluruh rencana kerja yang terkandung dalam Renja ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Biro Humas Tahun 2021, Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021 dan Renja Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas. Dengan demikian, Dokumen Renja Biro Humas 2021 ini merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dengan RKPD Biro Humas Tahun 2021, Renstra Biro Humas 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi provinsi pada RPJPD dan RPJMD Tahun 2016-2021 serta kondisi umum pemerintahan saat ini, maka arah kebijakan Biro Humas adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1. Strategi dan arah kebijakan Biro Humas Setda Prov. Sumbar**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur Peningkatan penerapan nilai-nilai integratis dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat atas informasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

keterkaitan Renstra Biro Humas dengan RPJMD 2016-2016 diatas hanya terdapat pada tahun awal RPJMD (tahun 2016) dimana indikator kinerja program Pemerintah Provinsi menjadi indikator kinerja Biro Humas.

Selanjutnya berdasarkan nomenklatur OPD sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2016 Biro Humas hanya sebagai pendukung dari pencapaian tujuan misi kedua pembangunan Sumatera Barat dengan merumuskan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Humas guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas pemberitaan sebagai upaya mendorong peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi mengawasi stabilitas pemberitaan penyelenggaraan informasi pembangunan daerah.
3. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Humas Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media massa.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Dokumen Renja Biro Humas Tahun 2020 ini disusun merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permenkominfo Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/Permen/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.Kominfo/b/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2020;
27. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
28. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 100/Kep/M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
29. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371/Kep/M.Kominfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah
30. Keputusan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi No 01/Kep/DISKDI/11/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

35. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
39. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-1045-2016 Tentang Rencana Startegis Santunan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **I.3.1 Maksud**

Renja Biro Humas 2021 dimaksudkan sebagai derivasi rencana tahun ke-5 dari Renstra Biro Humas 2016-2021 yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan anggaran Biro Humas dalam rentang waktu satu tahun terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2021.

#### **I.3.2 Tujuan**

Mendeskripsikan program prioritas, program pendukung, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Humas pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Biro Humas yang tertuang dalam Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021, sebagai Berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Periode tahun 2016-2021.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Bior Humas Sekretariat Dearah Provinsi Sumatera Barat.

5. Menyediakan Dasar Pijakan dalam Penetapan, Pengendalian, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Biro Humas Sekretariat Daerah

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, Renja Biro Humas Tahun 2021 disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam 4 (empat) Bab dimana masing-masing Bab mengandung substansi, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang penyusunan Renja Biro Humas Tahun 2021, Landasan Hukum yang menggariskan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Biro Humas, Uraian mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renja Biro Humas 2021, dan Sistematika Penulisan Renja Biro Humas Tahun 2021;
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, yang terdiri dari; Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Humas Tahun 2019 dan Capaian Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021, Analisis Kinerja Pelayanan Biro Humas, Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas; Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Telaahan atas Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan, yang terdiri dari; Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Biro Humas Tahun 2021, dan Program dan Kegiatan Biro Humas Tahun 2021;
- Bab IV Penutup, yang berisikan sari dari tiga Bab sebelumnya serta uraian mengenai aspek-aspek yang perlu digaris bawahi dan diperhatikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Tahun 2021.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

##### **II.1.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENJA BIRO HUMAS TAHUN 2019**

Di tahun 2019, dalam DPA Biro Humas terdapat 5 Program dan 27 Kegiatan dengan total Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.763.4379.920,- Pada APBD Perubahan 2019, Biro Humas dapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang disebar pada 10 (sepuluh) kegiatan yaitu: Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penatausahaan Keuangan SKPD, Peningkatan Sumberdaya Kehumasan Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan, Koordinasi Kehumasan, Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah. Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat, Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website, Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak,.

Secara umum, seluruh anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan guna mencapai 3 (tiga) sasaran yang disepakati dalam dokumen penetapan kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD 2016-2021.

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemberitaan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

**Tabel I. Hasil Pengukuran Kinerja Biro Humas Tahun 2019  
(per 31 Desember 2019 )**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran pemberitaan kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Media	<b>10 besar nasional</b>	<b>Akhir Tahun 2019</b>
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Daerah	Ratio pemberitaan (Positif:Netral:Negatif)	<b>40 : 40 : 20</b>	<b>Akhir Tahun 2019</b>
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.Nilai Evaluasi akutanbilitas	<b>B</b>	<b>B</b>

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Biro Humas diterapkan strategi yakni: meningkatkan materi berita/press berkuaitas; penyediaan materi berita/press release berkualitas; meningkatkan produktifitas penyebaran informasi/kebijakan program/kegiatan/press release yang terhimpun kepada lembaga pemerintah dan non-

pemerintah dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah dan media massa; meningkatkan produktifitas penyebaran informasi/kebijakan/program/kegiatan melalui media ruang, dialog interaktif dan film dokumenter potensi daerah yang diukur dengan menggunakan capaian yang diukur dengan Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan kerjasama dengan Intelligent Media Management (IMM). Biro Humas melaksanakannya melalui 2 Program yaitu Program Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp. 2.599.681.500** terlealisasi sebesar Rp. **2.465.779.582** atau sebesar **94,85 % (per 31 Desember 2019)**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2019 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 3.763.437.920,-. Hingga 31 Desember 2019, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 95.64% atau sebesar Rp. 3.599.409.653,-, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II. Realisasi Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019  
( Per 31 Desember 2019)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>946.145.220</b>	<b>925.995.571</b>	<b>97,87</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	9.992.850	<b>99,93</b>
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	105.600.000	98.080.652	<b>92,88</b>
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan Sopir Kantor	59.400.000	59.141.472	<b>99,56</b>
4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	23.000.000	22.134.527	<b>96,24</b>
5	Penyediaan alat tulis kantor	13.998.400	13.992.700	<b>99,96</b>
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	30.011.400	30.011.400	<b>100,00</b>
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	221.500.000	220.641.000	<b>99,61</b>
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	392.651.420	388.199.970	<b>98,87</b>
9	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	80.000.000	73.821.000	<b>92,28</b>
10	Penyediaan makan dan minum	9.984.000	9.980.000	<b>99,96</b>



<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>100.000.000</b>	<b>95.051.900</b>	<b>95,05</b>
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000	80.201.900	<b>94,36</b>
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.850.000	<b>99,00</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>5.650.400</b>	<b>5.251.000</b>	<b>92,93</b>
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	<b>5.650.400</b>	<b>5.251.000</b>	<b>92,93</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>116.231.400</b>	<b>113.544.000</b>	<b>97,69</b>
14	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	10.654.800	10.611.000	<b>99,59</b>
15	Penatausahaan SKPD	65.054.000	65.053.800	<b>100</b>
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.000.000	8.982.800	<b>99,81</b>
17	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	27.252.000	22.684.000	<b>83,24</b>
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.599.681.500</b>	<b>2.465.779.582</b>	<b>94,85</b>
18	Penyebaran Informasi Melalui Media Luar/Ruang	203.518.120	187.843.450	<b>92,30</b>
19	Peningkatan Sumberdaya Kehumasan	170.688.500	162.311.199	<b>95,09</b>
20	Pembuatan Film Dokumenter	89.001.600	86.983.000	<b>97,73</b>
21	Laporan Khusus Visualisasu Pembangunan	118.366.800	114.048.750	<b>96,35</b>
22	Koordinasi Kehumasan	98.357.960	54.852.200	<b>55,77</b>
23	Liputan kegiatan pemerintah daerah	652.491.280	652.278.783	<b>99,97</b>
24	Penyusunan Kebijakan komunikasi informasi persandian dan hubungan masyarakat	197.542.335	196.433.300	<b>99,44</b>
25	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website	242.860.000	223.410.000	<b>91,99</b>
26	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	494.798.000	487.507.900	<b>98,53</b>
27	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	332.056.905	300.111.000	<b>90,38</b>

Per 31 Desember tahun 2019, Biro Humas telah berhasil melaksanakan hampir seluruh program/kegiatan dengan capaian realisasi fisik 100% namun dengan realisasi keuangan 95,64%. Realisasi keuangan per 31 Desember tahun 2019 yang sudah diatas 90 % untuk hampir semua kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional
3. Penatausahaan Keuangan SKPD
4. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
6. Koordinasi Kehumasan
7. Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat
8. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik
9. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui MediaOline /Website
10. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan
11. Peningkatan Sumberdaya Kehumasan

Adapun kendala tidak tercapainya target realisasi keuangan kegiatan-kegiatan diatas dikarenakan oleh:

1. Perhitungan realisasi anggaran Tahun 2019 untuk penyusunan Renja Tahun 2021 tidak di akhir tahun sehingga realisasi akhir belum final yang dituangkan.
2. Perencanaan yang belum optimal
3. Salah dalam Penyusunan DPA dalam salah satu kegiatan sehingga tidak bisa dicairkan

Dengan melihat kendala diatas, beberapa hal yang perlu dilakukan Biro Humas kedepan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai target adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan kegiatan
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan
3. Meningkatkan koordinasi terkait jadwal pimpinan
4. Meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan survey secara intensif dalam penyusunan standar harga yang akan diinput kedalam DPA

Untuk capaian Pelaksanaan Renja SKPD/Program dan Kegiatan Tahun 2019 Tahun berjalan dituangkan dalam bentuk tabel yang mana didalam tabel tersebut berbentuk rincian aliran kas kegiatan pada Biro Humas. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran pada tahun 2019 Biro Humas melakukan pelaksanaan kegiatan di titik beratkan pada triwulan satu dan triwulan dua dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi sehingga membutuhkan anggaran tambahan di anggaran perubahan Tahun 2019 untuk bisa mendukung

terlaksananya seluruh kegiatan di Biro Humas dan program penyebarluasan informasi pemerintah daerah bisa terlaksana optimal. Untuk perkiraan pelaksanaan renja Biro Humas Tahun 2019 yang sedang berjalan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. T.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan**  
**Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2019**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama OPD: BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA BARAT**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 ( per 31 Nov 2019)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terselenggaranya jasa telepon , bandwith, Internet, Radio Link	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	25 unit	7 unit	4 unit	4 unit	100 %	4 unit	4 unit	100 %
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis perkantoran	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk perkantoran	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan pendukung penyelenggaraan rapat-rapat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya penunjang makan minum rapat rapat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya penyediaan jasa dokumentasi	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya sopir kantor	39 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 ( per 31 Nov 2019)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	Jumlah publikasi pembangunan melalui media luar/ruang	1070 meter baliho, 254 baliho Pembangunan 12 konstruksi baliho,	263 baliho, 40 baliho pembangunan dan 50 banner	116 baliho, 40 baliho, 2.000 kalender, 180 meter spanduk, 7.500 poster dan 1 konstruksi baliho	33 baliho, 2.000 kalender, 180 meter spanduk, 7.500 poster dan 1 konstruksi baliho	100 %	263 meter spanduk, 45 baliho pembangunan dan 50 banner	263 meter spanduk, 45 baliho pembangunan dan 50 banner	100 %
	Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah press-release hasil liputan	2249 (12 bln)	1050 (12 bln)	300	1.049	100 %	1050 (12 bln)	1050 (12 bln)	100 %
	Koordinasi Kehumasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Bakohumas	13 kali	2 kali	3 kali	3 kali	100 %	2 kali	2 kali	100 %
	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	Jumlah penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak ke masyarakat	1878 publikasi	500 publikasi	390 publikasi	288 publikasi	100 %	500 publikasi	500 publikasi	100 %
	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	Jumlah pelaksanaan dialog interaktif melalui media televisi dan radio	166 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 152 Kali Siaran Tunda (TV), 133 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	9 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 23 Kali Siaran Tunda (TV), 7 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	21 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 26 Kali Siaran Tunda (TV), 3 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	15 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 18 Kali Siaran Tunda (TV), 3 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	100 %	9 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 23 Kali Siaran Tunda (TV), 7 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	9 Kali Siaran Langsung ( TVRI dan TV Lokal ), Penayangan Dialog TV dan 23 Kali Siaran Tunda (TV), 7 Kali Siaran Radio Pemerintah/Swasta	100 %
	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Pemberitaan Media Massa	Jumlah klipng koran harian dan analisa headline pada media cetak	7.224 klipng dan 5.160 analisa headline		-	-	-			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 ( per 31 Nov 2019)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembuatan Film Dokumenter	Jumlah film dokumenter potensi daerah	18 paket	2 paket	3 paket	3 paket	100 %	2 paket	2 paket	100 %
	Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kebijakan Pemprov dan Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi	4 kali	1 kali	1 kali		100 %	1 kali	1 kali	100 %
	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	Jumlah pembuatan Buku Visualisasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	600 buku	-	100 buku	200 buku	100 %	90 buku	90 buku	100 %

## II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas menerjemahkan Visi Pembangunan Sumatera Barat ke dalam Visi Pembangunan Biro Humas Tahun 2016-2021, yakni:

*“Terwujudnya penyelenggaraan publikasi kehumasan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinamis dan profesional”*

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan ini, Biro Humas menetapkan Misi sebagai berikut:

*“Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah Sumatera Barat”*

Tujuan misi Biro Humas yaitu *“Penyelenggaraan Pemerintah Dipercaya Masyarakat”*

Untuk pencapaian Tujuan diatas, Biro Humas menyusun sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan pemerintah daerah;
  3. Meningkatkan tata kelola organisasi
- dengan indikator kinerja: Peringkat sebaran pemberitaan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa dan Rasio pemberitaan.

Dalam Analisis kinerja pelayanan OPD Biro Humas, pada misi diatas merupakan wujud dari pelayanan biro humas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta wujud pelayanan OPD tersebut dituangkan kedalam program dan kegiatan Biro Humas. Adapun kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan kinerja pelayanan pimpinan adalah terutama dalam rangka mendukung Tujuan Misi Biro Humas yaitu:

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintah provinsi Sumatera Barat. Arah kebijakan untuk mendorong teknologi informasi dalam pengolahan dan penghimpun materi pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintah
2. Meningkatkan produktifitas penyebaran informasi / kebijakan/ program /kegiatan / press release yang terhimpun kepada lembaga pemerintah



[20]

3. Meningkatkan ketersediaan anggaran dan sarana pendukung kebijakan pengadaan luar ruang , flim dokumenter potensi daerah, dialog interaktif

**Tabel IV. T.32**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Humas**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019 (Per Nov 2019)	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peringkat Sebaran Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	-	-	13 besar Nasio nal	12 besar Nasio nal	12 besar Nasio nal	12 besar Nasio nal	12 besar Nasio nal	12 besar Nasio nal	3 Nasio nal	- besar Nasiona l	10 Nasio nal -	9 Nasio nal	
2	Ratio Pemberitaan	-	-	40:40: 20	40:40: 20	40:40: 20	40:40: 20	40:40: 20	37:39: 24	38:22: 40	-	40:40: 20	40:40: 20	
4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	CC	B	BB	BB	BB	CC	B	-	BB	A	
5	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	-	-	95% 90%	100% 95%	100% 95%	100% 95%	100% 95%	100% 93,45 %	100% 89,55 %	100% 79,68%	100% 95%	100% 95%	

Catatan : Tolok Ukur yang dipakai untuk menguji indikator kinerja Biro Humas diambil dari Data IMM(inteligent Media Management) yang merupakan Lembaga Survei Independen yang memonitoring isu penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah seluruh indonesia yang dimulai dari 1 Januari- 31 Desember.

### II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Biro Humas melaksanakan fungsi Koordinasi dan kerjasama dengan OPD di lingkungan Kabupaten/Kota telah diinisiasi serta diupayakan sejak tahun 2011 lalu, Kemudian dengan dibentuknya OPD baru Biro Humas berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat serta pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian informasi pemerintah daerah kepada publik melalui media konvensional dan media online.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Humas Pemerintah saat ini adalah kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di era demokrasi dimana rakyat bebas, aktif, jujur, adil dan terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain sebagai berikut :

Dari segi pelayanan publik :

1. Pertumbuhan Media Massa yang semakin pesat, baik media konvensional maupun media sosial yang semakin sulit dan rumit melakukan evaluasi dan monitoring informasi isu yang berkembang begitu cepat ditengah-tengah masyarakat.
2. Kemajuan teknologi informasi dapat sebagai tantangan, ancaman dan peluang dalam meningkatkan kinerja humas pemerintah mengelola, menata penyelenggaraan informasi pemerintah daerah yang lebih akurat, efisien, efektif, terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Gerakan nasional revolusi mental ini harus benar-benar bisa meresap dan menginternalisasi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan sosialisasi menyeluruh kepada publik melalui konsep Government Public Relation (GPR). Konsep ini sejatinya ingin membuat publik atau masyarakat bisa mengerti, memahami dan menyerap semua pesan dalam gerakan revolusi mental.
4. Humas Pemerintah dituntut untuk mampu menyerap aspirasi publik sebagai multifungsi; sebagai koordinator, diseminator, sekaligus '*Information Hub*' kebijakan pemerintah yang pada waktu bersamaan juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari segi kelembagaan :

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan OPD dalam kegiatan penyelenggaraan publikasi kehumasan daerah dan di lingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi, kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hingga ke tingkat akar rumput;
3. Melakukan pengkajian pemberitaan/isu yang berkembang sebagai bahan referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan;
4. Melakukan koordinasi kegiatan kehumasan daerah guna sinegritas program dan kegiatan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah ;

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan OPD provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

Dari segi SDM Aparatur :

1. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melaksanakan fungsi kehumasan;
2. Jumlah dan kualitas aparatur belum memadai untuk menjalankan tupoksi kehumasan

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional', Tujuan 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, dan Akuntabel', Sasaran 1 'Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, Transparansi, dan Akuntabilitas';
2. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya'.

## **1. RESTRUKTURISASI OPD SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Humas, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro Humas

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Humas Sekretaria Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Pergub 69 Tahun 2017 terdapat pada pasal 31 sebagai berikut:

**Tugas Pokok** : Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memvalidasi, mengkoordinasikan, mempromosikan, memimpin, menetapkan program dan pelayanan serta evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan rincian tugas sbb:

- a. Menyelenggarakan perumusan, program dan penetapan program kerja biro humas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
- c. Melakukan promosi dan kepemimpinan pemerintah daerah;
- d. Menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. Menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan-bahan informasi pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. Menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dengan media massa dan pemanfaatan sarana dan prasana teknologi informasi dilingkungan sekretariat daerah.

Sebagai OPD yang memiliki fungsi melaksanakan hubungan masyarakat, Biro Humas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan

tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, dalam melaksanakan dua kewajiban utamanya ini, Biro Humas dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:

1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Baru (*website*);
3. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;
4. Media Luar Ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho; dan
5. Media Sosial.

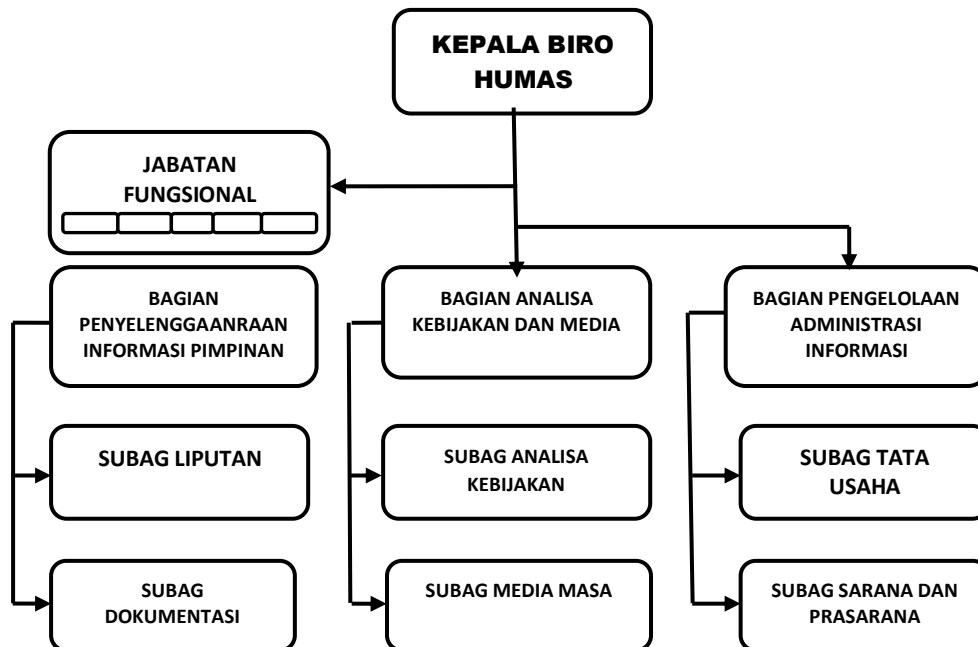
Berkaitan dengan itu, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Merespon hal tersebut, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya merumuskan program dan kegiatan baru yang tetap mampu menunjang tercapainya Visi-Misi Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 namun tidak menyelisih tugas pokok, fungsi, Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan ini, secara umum. pada 6 (enam) fungsi Biro Humas, yakni:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pemnantu OPD;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. memverifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Struktur internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016, dapat dilihat pada bagan gambar II.1. berikut:

**Gambar I.**  
**Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**



## **2. KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam konteks Penyebarluasan Informasi terkait Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah maupun Informasi Nasional, Biro Humas pada dasarnya perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk mendorong tersiarnya pemberitaan kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah secara nasional dan menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional ke masyarakat secara terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya.

Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi melalui Diskominfo setelah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi yang didiseminasikan, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah cenderung terhambat.

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan OPD yang bertanggungjawab di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Penanganan isu dan krisis komunikasi Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah dari aspek kehumasan;
3. Penyiapan *press-release*, sambutan, dan pidato Kepala Daerah berdasarkan briefing notes dari Diskominfo atau bahan komunikasi Kepala Daerah dari Perangkat Daerah lain;
4. Liputan dan Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah.

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, namun proses penyebarluasan informasi masih terkesan tidak berjalan pada satu rel yang sama.

### **3. KENDALA DAN HAMBATAN**

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai pada Bab II.3.1 di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

1. Belum terinputnya seluruh realisasi keunagang dikarenakan penghitungannya masi per 31 November 2019
2. Sempitnya kewenangan Biro Humas dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah bahkan di lingkungan internal pemerintah sendiri;
3. Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah.
5. Adanya salah kode rekening dalam membuat RKA pada kegaitan Media luar Ruang sehingga Anggaranya tidak bisa di cairkan

### **4. TANTANGAN DAN PELUANG**

Sejumlah tantangan dan peluang dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang timbul karena beragam faktor



seperti: perkembangan TIK; perubahan *trend* komunikasi publik; dan kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan yang apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin akan berpengaruh baik terhadap peningkatan pelayanan Biro Humas, antara lain:

1. Perkembangan pesat TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet melalui telepon genggam;
2. Banyaknya jumlah pengguna media sosial Indonesia (Peringkat ke-4 di dunia untuk jumlah pengguna Facebook dan peringkat ke-5 di dunia untuk jumlah pengguna Twitter);
3. Pergeseran *trend* media penyebar berita dan informasi dari media konvensional ke media daring dan media sosial;
4. Semakin kompleksnya *stakeholder* yang terlibat dan saling mempengaruhi di era keterbukaan dan digitalisasi informasi
5. Semakin kaburnya kategori media massa *mainstream* dengan media sosial yang kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini publik;
6. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;
7. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Kepala Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan menyebarluaskan; Informasi Pembangunan Daerah, mencakup; kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; Informasi Keuangan Daerah, mencakup; informasi anggaran, informasi pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; dan, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dengan menimbang sejumlah program prioritas pemerintah provinsi dan kondisi Sumatera Barat, antara lain:
  - Pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan prioritas utama;
  - Swasembada Pangan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan strategi untuk mewujudkan swasembada pangan dengan membenahi dan membangun sejumlah irigasi di Sumatera Barat untuk membantu pengairan sawah, memaksimalkan peran penyuluh pertanian dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat menggunakan metode yang efektif dan efisien sehingga hasil panen bisa lebih meningkat, dan terus mengembangkan metode baru baik berupa pertanian organik atau lainnya sehingga hasil panen bisa lebih banyak, serta memastikan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga apabila saat dibutuhkan bisa langsung digunakan;

- Kebijakan pembangunan kemaritiman oleh Presiden RI yang menguntungkan Sumatera Barat dengan menimbang 2.000 km garis pantai Sumatera Barat, potensi ekonomi kandungan laut Sumatera Barat;
  - Risiko Bencana Sumatera Barat, antara lain; Gempa bumi yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Tsunami yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Letusan Gunung Berapi dari empat gunung api aktif yaitu Merapi, Tandikat, Talang dan Kerinci yang berada di Tingkat Risiko II, dalam arti, berpotensi menimbulkan jumlah korban yang besar namun kemungkinan untuk terjadinya rendah; Banjir yang berada di Tingkat Resiko I; Abrasi Pantai dan Badai Di Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah; longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang termasuk dalam tingkat risiko II dan III;
9. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum maksimal diketahui oleh publik;
  10. Masih rendahnya tingkat produktifitas pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Nasional;
  11. Belum terkelolanya seluruh saluran informasi dan komunikasi publik dalam rangka diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada tahap awal pengusulan Renja Biro Humas Tahun 2020, sesuai dengan Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal renja Biro Humas dijadikan bahan usulan rancangan awal RKPD tahun 2020.









## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

### **III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam RPJMN Tahun 2016-2021, tertuang sembilan agenda pokok untuk mewujudkan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda pokok yang diberi nama Nawa Cita tersebut, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;**
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Adapun tujuan Rencana Kerja Biro Humas tahun 2021 adalah untuk menggambarkan perencanaan kerangka indikatif pendanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dengan terlebih dahulu menyusun menetapkan indikator-indikator kinerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi dari Biro Humas yang ingin dicapai dalam periode satu tahun.

Adapun sasaran Renja OPD adalah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang dituangkan kedalam sasaran renja Biro Humas, mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Biro Humas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD)

Rencana Strategis 2016-2021 (Renstra) Biro Humas mengacu pada pre kondisi global, nasional dan lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Biro Humas menyusun Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan Biro Humas.

Renstra Biro Humas ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehumasan dan Komunikasi & Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2021, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta *trend* komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021, Visi Gubernur Sumatera Barat yang ingin diwujudkan adalah:

**“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Visi Gubernur Sumatera Barat ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Misi kedua, 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional', dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah Strategi antara lain :

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem *whistleblowing*,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan *e-Government*,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

### **III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk Tahun Anggaran 2021, Program Biro Humas ada 2 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Administrasi Umum

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyediaan jasa surat-menyurat
6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
7. Penyediaan Alat Tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
12. Penyediaan jasa administrasi keuangan
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

## **B. Program Penataan Administrasi Umum**

Program Penataan Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yakni:

1. Penyiapan Materi Pimpinan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Dokumentasi Pimpinan

Anggaran yang tersedia pada RPJMD pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk Biro Humas tahun 2021 sebesar Rp. **8.861.000.000,-** sedangkan setelah dilaksanakan beberapa kali pembahasan mengenai RKPD kegiatan pada Biro Humas terjadi pergeseran dan penyesuaian anggaran dimana terdapat pengurangan anggaran yang semula Rp. **8,861,000.000,-** menjadi Rp. **4.065.851.000,-** dimana pengurangan ini juga terjadi pada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat yang diakibatkan pengaruh dari Pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan imbas yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan dan pemerintahan provinsi Sumatera Barat dan juga pastinya berimbas terhadap penganggaran kegiatan untuk tahun 2021 dimana terdapat pengurangan pendapatan daerah provinsi Sumbar yang berdampak terhadap pengurangan anggaran pada Biro Humas.

Kemudian juga untuk tahun 2021 Biro Humas akan mengalami penggantian tupoksi dan penggantian nama menjadi Biro Administrasi Pelayanan Pimpinan dimana tupoksinya lebih memprioritaskan semua kegiatan pimpinan sehingga dapat mengekspose kegiatan tersebut ke masyarakat. Meskipun Biro Humas akan mengganti tupoksinya tetapi kami dalam penganggaran ini masih berpedoman kepada aturan mengenai Biro Humas karena aturan mengenai Biro Administrasi Pelayanan Pimpinan sedang dalam proses pembuatan yang mungkin akan memakan waktu yang lama.







## **BAB IV PENUTUP**

Untuk mencapai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tujuan dan saran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENJA Biro Humas merupakan faktor pendukung pencapaian kinerja yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas pendanaan/penganggaran serta aspek Sumberdaya Manusia. Mengingat aspek pendanaan dan SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga dimana perlu pendanaan, kesejahteraan dan pengembangan karier serta peningkatan sarana dan prasarana, Pendekatan rasional terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Humas pada Tahun Anggaran 2021 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan plafon anggaran Tahun 2021, untuk Biro Humas karena pada dasarnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipegang oleh Biro Humas merupakan kunci pokok dalam Publikasi, transparansi dan keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan apa-apa saja yang telah dilaksanakan selama 5 tahun masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan, RENJA ini menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga terutama untuk kinerja Biro Humas di Tahun 2021.

Demikian Renja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Agustus 2020  
Plt. KEPALA BIRO HUMAS

**ZARDI SYAHRIR, SH.MM**  
NIP. 19680621 198903 1 003

**Tabel V .31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2021**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,605,714,250</b>	I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,605,714,250</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	kebutuhan administrasi surat-menysurat untuk kepentingan dinas	12 bulan	14,500,000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	kebutuhan administrasi surat-menysurat untuk kepentingan dinas	12 bulan	14,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Padang	Kebutuhan jasa telepon, bandwidth, astinet, radio link SKPD	12 bulan	111,120,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Padang	Kebutuhan jasa telepon, bandwidth, astinet, radio link SKPD	12 bulan	111,120,000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Padang	kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan	5 Unit Premi Kendaraan Dinas Operasional	32,300,000	3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Padang	kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan	5 Unit Premi Kendaraan Dinas Operasional	32,300,000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Padang	kebutuhan alat tulis perkantoran	12 bulan	23,447,200	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Padang	kebutuhan alat tulis perkantoran	12 bulan	23,447,200
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	kebutuhan barang cetakan dan pengadaan untuk perkantoran	12 bulan	36,000,000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	kebutuhan barang cetakan dan pengadaan untuk perkantoran	12 bulan	36,000,000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kota Padang	Koran, majalah dan tabloid	12 bulan	320,418,000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kota Padang	Koran, majalah dan tabloid	12 bulan	320,418,000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Dalam dan Luar Provinsi	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar negeri	12 bulan	647,487,200	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Dalam dan Luar Provinsi	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar negeri	12 bulan	647,487,200
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Kota Padang	penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	12 bulan	220,641,850	8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Kota Padang	penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	12 bulan	220,641,850
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Padang	kebutuhan makan dan minum untuk pendukung penyelenggaraan rapat-rapat	12 bulan	20,800,000	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Padang	kebutuhan makan dan minum untuk pendukung penyelenggaraan rapat-rapat	12 bulan	20,800,000
10	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Kota Padang	jumlah sopir kantor yang dipenuhi	5 orang	179,000,000	10	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Kota Padang	jumlah sopir kantor yang dipenuhi	5 orang	179,000,000
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Biro Humas</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>(1)100% (2) Zona Hijau</b>	<b>305,000,000</b>	II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Biro Humas</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>(1)100% (2) Zona Hijau</b>	<b>907,493,420</b>
11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Kota Padang	Komputer dan printer yang diadakan	2unit Laptop, 3 unit komputer/pc dan 3 unit printer	87,000,000	11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Kota Padang	Komputer dan printer yang diadakan	2unit Laptop, 3 unit komputer/pc dan 3 unit printer	87,000,000
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	1 unit	70,625,000	12	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	1 unit	580,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	peralatan kantor yang dipelihara	Camera digital 3 kali, Camera Video 1 kali, Drone 1 kali, Mesin Tik 2 kali, AC 15 kali, Laptop 12 kali, Komputer/PC 15 kali dan 12 kali Printer	36,750,000	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	peralatan kantor yang dipelihara	Camera digital 3 kali, Camera Video 1 kali, Drone 1 kali, Mesin Tik 2 kali, AC 15 kali, Laptop 12 kali, Komputer/PC 15 kali dan 12 kali Printer	36,750,000
14	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan Dinas Operasional	Kota Padang	kendaraan dinas yang dipelihara Terpeliharanya kendraan dinas operasional	5 Unit Service, 5 Unit Pajak, 200 Itr Pelumas/BBM	110,625,000	14	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan Dinas Operasional	Biro Humas	kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit Service, 5 Unit Pajak, 200 Itr Pelumas/BBM	110,625,000
						15	Pengadaan Meubeler	Kota Padang	Jumlah meubeler yang diadakan	1 Kursi eselon II, 3 Kursi Eselon III, 1 Rak Buku	53,500,000
						16	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi	Kota Padang	Kamera dan video record	1 unit kamera digital	39,618,420
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Biro Humas	Rata-rata lamanya PNS yang Mengikuti Diklat	50 JPL/orang/tahun	104,100,000	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Biro Humas	Rata-rata lamanya PNS yang Mengikuti Diklat	50 JPL/orang/tahun	104,100,000
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dalam dan Luar Provinsi	pengembangan SDM aparatur humas yang dikuti	32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	104,100,000	17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dalam dan Luar Provinsi	pengembangan SDM aparatur humas yang dikuti	32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	104,100,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Padang	(1).Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD (2). Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (3) Tingkat Akurasi dan Kecermatan dalam Pengelolaan Keuangan (4) Persentase Kesesuaian Usulan Renja dengan Renstra SKPD (5) Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	(1) 100 % (2) A Predikat ( 3) 100 % (4) 100 % (5) 100 %	264,481,900	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Padang	(1).Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD (2). Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (3) Tingkat Akurasi dan Kecermatan dalam Pengelolaan Keuangan (4) Persentase Kesesuaian Usulan Renja dengan Renstra SKPD (5) Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	(1) 100 % (2) A Predikat ( 3) 100 % (4) 100 % (5) 100 %	264,481,900
16	Pengelolaan Pengawasan Pengendalian Aset	Kota Padang	Kebutuhan honor pengurus dan penyimpan barang, pejabat pengadaan PPHP dan operator aset	12 bulan	44,350,000	18	Pengelolaan Pengawasan Pengendalian Aset	Kota Padang	Kebutuhah honor pengurus dan penyimpan barang, pejabat pengadaan PPHP dan operator aset	12 bulan	44,350,000



No.	Rancangan Awal RKP					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Dokumen laporan kegiatan SKPD	LAKIP, LKPJ, Laporan realisasi keuangan, Laporan keuangan dan aset, Honorarium Simbangda, Laporan Fisik keuangan 30 bk	115,204,200	19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Dokumen laporan kegiatan SKPD	LAKIP, LKPJ, Laporan realisasi keuangan, Laporan keuangan dan aset, Honorarium Simbangda, Laporan Fisik keuangan 30 bk	115,204,200
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kota Padang	Dokumen Perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	17,291,800	20	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kota Padang	Dokumen Perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	17,291,800
19	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Padang	Kebutuhan Honorarium KPA, Bendahara, PPTK, Operator SIPKD	12 bulan	87,635,900	21	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Padang	Kebutuhan Honorarium KPA, Bendahara, PPTK, Operator SIPKD	12 bulan	87,635,900
V	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sumatera Barat	[1] Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa [2] Rasio pemberitaan [3] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak [4] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik [5] Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	[1] Ranking 9 [2] 40:40:20 [3] 100% [4] 100% [5] 100%	5,979,210,430	V	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sumatera Barat	[1] Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa [2] Rasio pemberitaan [3] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak [4] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik [5] Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	[1] Ranking 9 [2] 40:40:20 [3] 100% [4] 100% [5] 100%	5,979,210,430
20	Liputan Kegiatan pemerintah daerah	Sumatera Barat	Jumlah Pers-release hasil liputan,	500 pers release	1,500,000,000	22	Liputan Kegiatan pemerintah daerah	Sumatera Barat	Jumlah Pers-release hasil liputan,	500 pers release	1,500,000,000
21	Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah	Sumatera Barat	Jumlah film dokumenter Daerah dan kegiatan pimpinan	2 paket film potensi daerah, 24 CD kegiatan dan 150 penggandaan film dokumenter dan 10 stand frame	290,134,200	23	Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah	Sumatera Barat	Jumlah film dokumenter Daerah dan kegiatan pimpinan	2 paket film potensi daerah, 24 CD kegiatan dan 150 penggandaan film dokumenter dan 10 stand frame	290,134,200
22	Forum Kehumasan	Sumatera Barat	Jumlah forum koordinasi bakohumas prov dan kab/kota	2 kali Pertemuan Forum Kehumasan Kab/Kota, Kalender Bakorhumas	511,538,200	24	Forum Kehumasan	Sumatera Barat	Jumlah forum koordinasi bakohumas prov dan kab/kota	2 kali Pertemuan Forum Kehumasan Kab/Kota, Kalender Bakorhumas	511,538,200

No.	Rancangan Awal RKPД					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Analisa Pemberitaan	Sumatera Barat	Jumlah rumusan dari isu yang berkembang	64 Buku himpunan e-Kliping, 168 buku rumusan analisa, kerjasama dengan pihak ketiag 12 bulan	317,072,530	25	Analisa Pemberitaan	Sumatera Barat	Jumlah rumusan dari isu yang berkembang	64 Buku himpunan e-Kliping, 168 buku rumusan analisa, kerjasama dengan pihak ketiag 12 bulan	317,072,530
24	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak	Sumatera Barat	Jumah publikasi melalui Media Cetak	51 publikasi	834,513,400	26	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak	Sumatera Barat	Jumah publikasi melalui Media Cetak	51 publikasi	834,513,400
25	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Elektronik	Sumatera Barat	Jumla Dialog Interaktif dan siaran tunda melalui media elektronik	16 kali siaran langsung, 14 kali siaran tunda dan 3 kali siaran radio, 1 kali siaran langsung	742,919,000	27	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Elektronik	Sumatera Barat	Jumla Dialog Interaktif dan siaran tunda melalui media elektronik	16 kali siaran langsung, 14 kali siaran tunda dan 3 kali siaran radio, 1 kali siaran langsung	742,919,000
26	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Luar/ruang	Sumatera Barat	Jumlah spanduk, baliho, konstruksi baliho	Spanduk Pemb. Digital 600 m, Baliho Pemb.142 bh, Pemeliharaan Konstruksi Baliho 3 bh	816,124,400	28	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Luar/ruang	Sumatera Barat	Jumlah spanduk, baliho, konstruksi baliho	Spanduk Pemb. Digital 600 m, Baliho Pemb.142 bh, Pemeliharaan Konstruksi Baliho 3 bh	816,124,400
27	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	Sumatera Barat	Jumlah buku Visual Pembangunan Prov. Sumbar	100 buku	141,037,000	29	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	Sumatera Barat	Jumlah buku Visual Pembangunan Prov. Sumbar	100 buku	141,037,000
28	Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Online/Wesibte	Sumatera Barat	Jumlah penyebaran informasi Pemerintah Daerah melalui media online	253 Media Publikasi	617,350,000	30	Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Online/Wesibte	Sumatera Barat	Jumlah penyebaran informasi Pemerintah Daerah melalui media online	253 Media Publikasi	617,350,000
29	Peningkatan Sumberdaya Kehumasan	Sumatera Barat	Workshop pengembangan Keterampilan Kehumasan	1 Kali; 50 orang	208,521,700	31	Peningkatan Sumberdaya Kehumasan	Sumatera Barat	Workshop pengembangan Keterampilan Kehumasan	1 Kali; 50 orang	208,521,700
<b>TOTAL</b>					<b>8,258,506,580</b>						<b>8,861,000,000</b>

Padang, Desember 2019  
**KEPALA BIRO HUMAS**

**Drs. JASMAN, MM**  
NIP. 19680101 198809 1 001



Catatan Penting

13





Tabel VII T.C. 33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>					<b>8,861,000,000</b>			<b>10,369,000,000</b>	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>100%</b>	<b>1,605,714,250</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,360,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kebutuhan administrasi surat-menyurat untuk kepentingan dinas	Kota Padang	12 bulan	14,500,000	APBD		12 bulan	14,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan jasa telepon, bandwidth, astinet, radio link SKPD	Kota Padang	12 bulan	111,120,000	APBD		12 bulan	140,000,000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan	Kota Padang	5 Unit Premi Kendaraan Dinas Operasional	32,300,000	APBD		5 Unit Premi Kendaraan Dinas Operasional	35,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kebutuhan alat tulis perkantoran	Kota Padang	12 bulan	23,447,200	APBD		12 bulan	18,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk perkantoran	Kota Padang	12 bulan	36,000,000	APBD		12 bulan	38,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Koran, majalah dan tabloid	Kota Padang	12 bulan	320,418,000	APBD		12 bulan	340,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar negeri	Dalam dan Luar Provinsi	12 bulan	647,487,200	APBD		12 bulan	470,000,000
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Kota Padang	12 bulan	220,641,850	APBD		12 bulan	90,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	kebutuhan makan dan minum untuk pendukung penyelenggaraan rapat-rapat	Kota Padang	12 bulan	20,800,000	APBD		12 bulan	15,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	jumlah sopir kantor yang dipenuhi	Kota Padang	5 orang	179,000,000	APBD		5 orang	200,000,000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>907,493,420</b>				<b>1,135,000,000</b>
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Komputer dan printer yang diadakan	Kota Padang	2 unit Laptop, 3 unit komputer/pc dan 3 unit printer	87,000,000	APBD		8 unit Laptop, 3 unit komputer/pc dan 5 unit printer	185,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	580,000,000	APBD		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	380,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor yang dipelihara	Kota Padang	Camera digital 3 kali, Camera Video 1 kali, Drone 1 kali, Mesin Tik 2 kali, AC 15 kali, Laptop 12 kali, Komputer/PC 15 kali dan 12 kali Printer	36,750,000	APBD		Camera digital 3 kali, Camera Video 1 kali, Drone 1 kali, Mesin Tik 2 kali, AC 15 kali, Laptop 12 kali, Komputer/PC 15 kali dan 12 kali Printer	50,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan Dinas Operasional	kendaraan dinas yang dipelihara	Biro Humas	5 Unit Service, 5 Unit Pajak, 200 ltr Pelumas/BBM	110,625,000	APBD		5 Unit Service, 5 Unit Pajak, 200 ltr Pelumas/BBM	145,000,000
	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Kota Padang	1 Kursi eselon II, 3 Kursi Eselon III, 1 Rak Buku	53,500,000	APBD		1 Set Meja Rapat, 50 Kursi Rapat	95,000,000
	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi	Kamera dan video record	Kota Padang	1 unit kamera digital	39,618,420	APBD		3 unit kamera digital 3 Video Record	280,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS yang Mengikuti Diklat</b>		<b>50 JPL/orang/tahun</b>	<b>104,100,000</b>			<b>50 JPL/orang/tahun</b>	<b>185,000,000</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	pengembangan SDM aparatur humas yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	104,100,000	APBD		32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	185,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>(1).Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD (2). Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (3) Tingkat Akurasi dan Kecermatan dalam Pengelolaan Keuangan (4) Persentase Kesesuaian Usulan Renja dengan Renstra SKPD (5) Persentase</b>	Kota Padang	<b>(1) 100 % (2) A Predikat ( 3) 100 % (4) 100 % (5) 100 %</b>	<b>264,481,900</b>			<b>(1) 100 % (2) A Predikat ( 3) 100 % (4) 100 % (5) 100 %</b>	<b>294,000,000</b>
	Pengelolaan Pengawasan Pengendalian Aset	Kebutuhan honor pengurus dan penyimpan barang, pe	Kota Padang	32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	104,100,000	APBD		32 kali bimtek dalam daerah dan luar daerah	115,000,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan kegiatan SKPD	Kota Padang	LAKIP, LKPJ, Laporan realisasi keuangan, Laporan keuangan keuangan dan aset, Honorarium Simbangda, Laporan Fisik keuangan 30 bk	115,204,200	APBD		LAKIP, LKPJ, Laporan realisasi keuangan, Laporan keuangan keuangan dan aset, Honorarium Simbangda, Laporan Fisik keuangan 30 bk	165,000,000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan penganggaran	Kota Padang	6 dokumen	17,291,800	APBD		6 dokumen	19,000,000
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kebutuha Honorarium KPA, Bendahara, PPTK, Operator SIPKD	Kota Padang	12 bulan	87,635,900	APBD		12 bulan	110,000,000
	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	[1] Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa [2] Rasio pemberitaan [3] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak [4] Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik [5] Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	Sumatera Barat	[1] Ranking 9 [2] 40:40:20 [3] 100% [4] 100% [5] 100%	5,979,210,430	APBD		[1] Ranking 9 [2] 40:40:20 [3] 100% [4] 100% [5] 100%	7,395,000,000
	Liputan Kegiatan pemerintah daerah	Jumlah Pers-release hasil liputan,	Sumatera Barat	500 pers release	1,500,000,000	APBD		500 pers release	1,650,000,000
	Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah	Jumlah flim dokomenter Daerah dan kegiatan pimpinan	Sumatera Barat	2 paket film potensi daerah, 24 CD kegiatan dan 150 penggandaan film dokumenter dan 10 stand frame	290,134,200	APBD		2 paket film potensi daerah, 24 CD kegiatan dan 150 penggandaan film dokumenter dan 10 stand frame	170,000,000
	Forum Kehumasan	Jumlah forum koordinasi bakohumas prov dan kab/kota	Sumatera Barat	2 kali Pertemuan Forum Kehumasan Kab/Kota, Kalender Bakorhumas	511,538,200	APBD		2 kali Pertemuan Forum Kehumasan Kab/Kota, Kalender Bakorhumas	650,000,000
	Analisa Pemberitaan	Jumlah rumusan dari isu yang berkembang	Sumatera Barat	64 Buku himpunan e-Kliping, 168 buku rumusan analisa, kerjasama dengan pihak ketiag 12 bulan	317,072,530	APBD		64 Buku himpunan e-Kliping, 168 buku rumusan analisa, kerjasama dengan pihak ketiag 12 bulan	450,000,000
	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak	Jumah publikasi melalui Media Cetak	Sumatera Barat	51 publikasi	834,513,400	APBD		51 publikasi	1,600,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Elektronik	Jumla Dialog Interaktif dan siaran tunda melalui media elektronik	Sumatera Barat	16 kali siaran langsung, 14 kali siaran tunda dan 3 kali siaran radio, 1 kali siaran langsung	742,919,000	APBD		16 kali siaran langsung, 14 kali siaran tunda dan 3 kali siaran radio, 1 kali siaran langsung	900,000,000
	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Luar/ruang	Jumlah spanduk, baliho, konstruksi baliho	Sumatera Barat	Spanduk Pemb. Digital 600 m, Baliho Pemb.142 bh, Pemeliharaan Konstruksi Baliho 3 bh	816,124,400	APBD		Spanduk Pemb. Digital 600 m, Baliho Pemb.142 bh, Pemeliharaan Konstruksi Baliho 3 bh	1,500,000,000
	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	Jumlah buku Visual Pembangunan Prov. Sumbar	Sumatera Barat	100 buku	141,037,000	APBD		100 buku	165,000,000
	Peningkatan Sumberdaya Kehumasan	Workshop pengembangan Keterampilan Kehumasan	Sumatera Barat	1 Kali; 50 orang	208,521,700	APBD		1 Kali; 50 orang	310,000,000
		Jumlah			8,861,000,000				10,369,000,000

Padang, Desember 2019  
**KEPALA BIRO HUMAS**

**Drs. JASMAN, MM**  
NIP. 19680101 198809 1 001